Peran Pembangunan Manusia Dan Desentralisasi Terhadap Kemiskinan Melalui Pertumbuhan Ekonomi

The Role of Human Development and Decentralization toward Poverty Through Economic Growth

Jihad Lukis Panjawa¹⁾

Fakultas Ekonomi Universitas Tidar

email: jipanjawa@untidara.ac.id

Joko Triyanto²⁾

Badan Pusat Statistik Kabupaten Sragen

email: joko.triyanto@bps.go.id

Submit: 07/04/2020 ; Direvisi; 14/04/2020 ; Publish; 30/04/2020

Abstract

Efforts to reduce poverty that continue in the sustainable development goals (SDGs), need to research with different approaches for each different problem. The objective of this research is to analyze the direct and indirect effects of human development and fiscal decentralization on poverty through economic growth in eastern Indonesia. The analytical method used the causal model for directly observed variables. The results show that there is no significant effect on human development and fiscal decentralization on economic growth. Also human development has a negative and significant direct effect on poverty but does not affect poverty through economic growth. Fiscal decentralization does no effect on poverty through economic growth, while economic growth has a negative and significant direct effect on poverty. Policy by prioritizing improving human resource qualities will be effective in reducing poverty directly.

Keywords : Human development; Decentralization; Economic Growth;

Abstrak

Upaya pengurangan kemiskinan yang terus berlanjut dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), perlu kajian dengan pendekatan yang berbeda untuk setiap permasalahan yang berbeda pula. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh langsung dan tidak langsung pembangunan manusia, desentralisasi fiskal terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi dengan studi kasus di kawasan timur Indonesia. Pendekatan *The causal model for directly observed variables* yang digunakan dalam metode penelitian ini. Hasil menunjukkan bahwa pembangunan manusia dan desentralisasi fiskal tidak berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain itu, pembangunan manusia secara langsung berpengaruh negatif dan nyata terhadap kemiskinan, namun tidak berpengaruh nyata terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi. Desentralisasi fiskal tidak berpengaruh nyata terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi, sedangkan pertumbuhan ekonomi secara langsung berpengaruh negatif dan nyata terhadap kemiskinan. Kebijakan dengan memprioritaskan peningkatan kualitas sumberdaya manusia akan efektif untuk menurunkan kemiskinan secara langsung.

Kata kunci: Pembangunan Manusia; Desentralisasi; Pertumbuhan Ekonomi; Kemiskinan

1. PENDAHULUAN

Kemiskinan masih menjadi permasalahan kompleks dan tantangan dalam pembangunan setiap negara. Pada dasarnya pembangunan yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Samputra dan Munanda (2019), kemiskinan dapat dijadikan sebagai salah satu indikator yang paling mudah digunakan dalam menilai tingkat kesejahteraan suatu negara. Tingkat kesejahteraan masyarakat suatu negara tinggi dapat tercermin dari presentase penduduk miskin yang menurun.

Bahkan setelah Tujuan Pembangunan Millennium (Millennium Development Goals/MDGs) berakhir, tujuan pembangunan tentang tidak ada kemiskinan dalam bentuk apapun muncul pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Sebagai salah satu negara berkembang dengan dikategorikan middle income country, Indonesia masih mengalami peliknya kemiskinan yang cukup tinggi.

Secara umum, Perkembangan tingkat kemiskinan pada periode 1999–2017 di Indonesia cenderung mengalami penurunan baik dari sisi jumlah maupun persentasenya. Adapun penurunan kemiskinan yang terjadi terlihat dari sisi absolut maupun relatif. Meskipun kemiskinan secara umum mengalami penurunan, presentase kemiskinan masih berada pada dua digit (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2017). Samputra dan Munanda (2019) menambahkan, kondisi tingkat kesejahteraan yang rendah dan tingkat kemiskinan yang tinggi terjadi hampir disebagian besar propinsi luar pulau Jawa.

Kemiskinan tidak cukup dipandang hanya sebatas kemampuan ekonomi. Kemiskinan dipandang sebagai kegagalan memenuhi hak dasar

dan perlakuan yang berbeda oleh seseorang atau masyarakat dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Secara umum, Hak-hak dasar yang dimaksud adalah terpenuhinya sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik (Badan Pusat Statistik, 2017b).

Meskipun berbagai kajian dan kajian telah dilakukan untuk terus mengurangi kemiskinan. Banyak kajian mengenai kemiskinan guna mendapatkan formula yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut. Beberapa kajian mengenai kemiskinan dengan pendekatan dan metode yang berbeda mulai dari metode panel data (Dartanto & Nurkholis, 2013; Prapdopo, 2018; Samputra & Munanda, 2019; Sofilda, Zilal, & Sholeh, 2013; Widianingrum, Riyanto, & Mulyanto, 2019), regresi berganda (Adeyemi, Ijaiya, & Raheem, 2009; Astrini & Purbadharmaja, 2013), analisis jalur (Prapdopo, 2018), probit dan tobit (Achia, Wangombe, & Khadioli, 2010; Akerele, Momoh, Samuel A Adewuyi, Biola B. Phillip, & Olumuyiwa F Ashaolu, 2012; Islam, Sayeed, & Hossain, 2017), model dinamis dengan spatial autoregressive (Caraka, 2017), metode Growth Incidence Curve dan Pro-Poor Growth Index (Permadi, 2018). Selain itu, indikator dan tingkat dimensi yang berbeda mulai antar negara (Adeyemi et al., 2009), suatu negara (Islam et al., 2017; Kedir & Mckay, 2005; Permadi, 2018), antar provinsi (Dartanto & Nurkholis, 2013; Pratama, 2014; Samputra & Munanda, 2019; Sofilda et al., 2013), tingkat provinsi (Astrini & Purbadharmaja, 2013; Caraka, 2017; Sisca HS, HAMzah, & Syechalad, 2013; Usman & Diramita, 2018), antar kabupaten dalam satu provinsi (Prapdopo, 2018; Sofilda et al., 2013; Widianingrum et al., 2019).

Berbagai kebijakan terus dilakukan untuk mengurangi kemiskinan. Salah satunya dengan pembangunan manusia melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Sumber daya manusia menjadi asset yang sangat penting dan investasi yang tidak ternilai dalam jangka panjang, apabila pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan dan menurunkan kemiskinan melalui pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas (Prapdopo, 2018; Samputra & Munanda, 2019; Sofilda et al., 2013). Sebagai indikator pengukur keberhasilan pembangunan manusia, indeks pembangunan manusia (IPM) yang memiliki konsep dasar yang dimiliki manusia diharapkan mampu membawa perubahan dalam kesejahteraan manusia (Arsyad, 2010; Badan Pusat Statistik, 2017a).

Upaya pengurangan kemiskinan melalui peranan pemerintah dalam kebijakan fiskal tentu sangat diperlukan. Desentralisasi fiskal sebagai wujud kebijakan pemerintah pusat yang memberikan wewenang kepada pemerintah daerah. Efisiensi ekonomi yang besar dalam pendistribusian sumber daya antar sektor dapat diwujudkan adanya desentralisasi fiskal. Mengingat bahwa desentralisasi fiskal mampu memperbaiki efisiensi ekonomi setelah pemerintah daerah lebih dekat dan cepat tanggap akan kebutuhan dan preferensi untuk masyarakat lokal dari pada pemerintah pusat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Fadli, 2014). Kontradiksi akan peran desentralisasi muncul akibat dari penerapan desentralisasi fiskal dalam upaya untuk mengurangi kemiskinan cenderung untuk menutup defisit anggaran, dan menarik anggaran pemerintah pusat untuk menutupi kekurangan tersebut. Adanya desentralisasi fiskal beresiko pemerintah daerah cenderung akan lebih korup daripada pemerintah pusat, menyebabkan keputusan pengeluaran yang buruk dan penyalahgunaan sumber daya publik. Pada akhirnya upaya pengurangan kemiskinan menjadi sia-sia sebagai akibat dari

program untuk orang miskin berkualitas rendah dan tidak merespons kebutuhan mereka (Agyemang-Duah et al., 2018; Crook, 2003)

Peran desentralisasi dan pembangunan manusia, selain untuk mengurangi kemiskinan, juga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Peran pertumbuhan ekonomi digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat diharapkan dapat dinikmati secara merata setiap golongan masyarakat, termasuk penduduk miskin. Dalam hipotesis kuznet, pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan memiliki hubungan yang erat. Pada tahap awal proses pembangunan, tingkat kemiskinan cenderung tinggi karena pertumbuhan ekonomi sebagai akibat dari distribusi pendapatan belum merata kesemua golongan. Namun, dalam jangka panjang, dengan pembangunan yang mulai merata, secara berangsur-angsur mampu mengurangi kemiskinan (Arsyad, 2010; Prapdopo, 2018). Paradox hubungan pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan mungkin terjadi. Selain disebabkan priode waktu yang singkat (jangka pendek), pertumbuhan ekonomi tinggi belum tentu menurunkan kemiskinan. Hal tersebut dapat juga disebabkan adanya kebijakan pemerintah yang diimplementasikan tidak pro poor tetapi pro rich, pengeluaran yang kurang produktif pada sektor-sektor basis dan bahkan akibat investasi yang padat modal.

Berdasarkan kajian dan upaya pengurangan kemiskinan yang terus berlanjut dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), perlu kajian dengan pendekatan yang berbeda untuk setiap permasalahan yang berbeda pula. Selain itu, Kawasan Indonesia Timur memiliki gap yang cukup nyata dibandingkan Kawasan Indonesia Barat dalam pembangunan ekonomi. Lebih lanjut, adanya distorsi model menjadi permasalahan dalam upaya pengentasan kemiskinan. Penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan melalui tawaran suatu model ekonometrika. Oleh karena itu, penelitian ini akan melakukan investigasi terkait pengaruh langsung dan tidak langsung pembangunan manusia, desentralisasi fiskal terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi di kawasan timur Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif dengan jenis data cross section. Adapun data cross section meliputi kabupaten dan kota di kawasan Indonesia Timur tahun 2017, yang datanya bersumber dari publikasi Badan Pusat Statistik Indonesia. *The causal model for directly observed variables* digunakan sebagai alat analisis guna menjawab tujuan penelitian ini. Menurut Ghazali (2016) Analisis tersebut merupakan metode analisis data multivariat yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung beberapa variabel eksogen terhadap variabel endogen dengan pola rekursif dan semua variabel dapat diobservasi secara langsung. Korelasi antarvariabel adalah satu arah dan tidak ada hubungan yang bersifat resiprokal diartikan sebagai rekursif. Variabel mampu diobservasi langsung, dengan kata lain, variabel yang dianalisis adalah variabel manifes. Dalam penelitian ini, model yang digunakan merupakan modifikasi dari penelitian Suliswanto (2010) serta Widianingrum, Riyanto, dan Mulyanto (2019). Berikut modifikasi persamaan untuk *the causal model for directly observed variables* yang digunakan untuk menganalisis pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung variabel indeks pembangunan manusia, desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di kabupaten dan kota kawasan timur Indonesia :

$$EG = \alpha_1 IPM_i + \alpha_2 FDPAD_i + \varepsilon 1_i \quad (1)$$

$$POV = \beta_1 IPM_i + \beta_2 FDPAD_i + \beta_3 EG_i + \varepsilon 2_i \quad (2)$$

di mana, POV adalah tingkat kemiskinan dalam satuan persen, EG adalah pertumbuhan ekonomi dalam satuan persen, IPM adalah indeks pembangunan manusia sebagai proksi pembangunan manusia, FDPAD adalah desentralisasi fiskal yang diukur dengan rasio penerimaan asli daerah terhadap total pendapatan sebagai proksi kebijakan otonomi, α dan β adalah koefisien, i adalah kabupaten/kota, dan ε adalah *error term*.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Salah satu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs/ *Sustainable Development Goals*) adalah tidak ada kemiskinan dimanapun. Suatu perencanaan, strategi dan kebijakan pembangunan dalam mengatasi kemiskinan terus diterapkan secara terintegrasi mulai dari nasional sampai regional. Guna memberikan alternatif penyelesaian permasalahan kemiskinan di Indonesia, khususnya kawasan Indonesia Timur dengan menganalisis pengaruh langsung dan tidak langsung pembangunan manusia, desentralisasi fiskal melalui pertumbuhan ekonomi. Tabel 1 menampilkan hasil regres untuk *the causal model for directly observed variables*.

Tabel 1. Estimator of *the causal model for directly observed variables*

Estimator 1		
$EG = -0,0010 IPM_i + 0,0770 FDPAD_i + 0,9970_i$		
(0,9850)	(0,2820)	
Rsquare = 0,0060; Dw-Stat = 1,7110; F-Stat = 0,6770; Prob.F stat = 0,5090		
Estimator 2		
$POV = -0,7450 IPM_i + 0,0350 FDPAD_i - 0,1070 EG_i + 0,6700_i$		
(0,0000***)	(0,4670)	(0,0170**)
Rsquare = 0,5510; Dw-Stat = 1,0230; F-Stat = 93,2250; Prob.F stat = 0,0000		
catatan: *** significant of alfa 1% and ** significant of alfa 5%		

Mengacu pada output Regresi Model I pada bagian tabel Estimator dapat diketahui bahwa variabel IPM dan desentralisasi fiskal tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Nilai R-Square adalah sebesar 0,0060, yang berarti variansi pengaruh IPM dan desentralisasi fiskal hanya mampu menjelaskan variansi pertumbuhan ekonomi sebesar 0,6 persen, sementara sisanya 99,4 persen dijelaskan oleh faktor lain yang tidak disertakan dalam model penelitian. Sementara itu, untuk nilai $\varepsilon 1$ dapat dicari dengan rumus $\varepsilon 1 = \sqrt{(1-0,0060)} = 0,9970$.

Berdasarkan output Regresi Model II pada bagian tabel Estimator, diketahui bahwa variabel IPM dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan, sedangkan desentralisasi fiskal tidak berpengaruh terhadap kemiskinan. Nilai R-Square adalah sebesar 0,5510, yang berarti variansi IPM, desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi hanya mampu menjelaskan variansi kemiskinan sebesar 55,10 persen, sementara sisanya 44,89 persen dijelaskan oleh faktor lain yang tidak disertakan dalam model penelitian. Sementara untuk nilai $\varepsilon 2 = \sqrt{(1-0,5510)} = 0,6700$. Dengan demikian diperoleh *Schema of the causal model for directly observed variables* sebagai berikut:

Gambar 1. Skema causal model for directly observed variables

Berdasarkan uji distribusi residual pada tabel 2 dapat disimpulkan bahwa residual terdistribusi secara normal. Hasil tersebut diperoleh dengan membandingkan nilai *asyp.sig* Kolmogorov-Smirnov dengan α (alfa), yaitu $0,0000 < 0,01$. Pengujian ini penting dilakukan untuk terpenuhinya asumsi bahwa Model yang digunakan diasumsikan atau dispesifikasikan secara tepat, yaitu dengan memasukkan semua penyebab ke dalam model.

Tabel 2. *Distribution Residual Test*

Kolmogorov-Smirnov Z	Asymp. Sig. (2-tailed)
0,0590	0,0000

Keterangan : *** signifikan pada alfa 1%

Berdasarkan hasil pembahasan sebelumnya pada tabel 1 menunjukkan bahwa IPM dan desentralisasi fiskal tidak ada berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga dapat disimpulkan bahwa IPM dan desentralisasi fiskal secara langsung tidak terdapat pengaruh nyata terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain itu, IPM berpengaruh langsung terhadap kemiskinan, namun tidak berpengaruh nyata melalui pertumbuhan ekonomi. Desentralisasi fiskal tidak berpengaruh terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi, sedangkan pertumbuhan ekonomi berpengaruh langsung terhadap kemiskinan. Besarnya pengaruh langsung, tidak langsung dan secara total dapat dilihat secara lengkap pada tabel 3.

Tabel 3. *Coefficients of Variables Directly and Indirectly*

Slope	Direct Effect	Indirect Effect	Total Effect
IPM → EG	-0,0010	-	-0,0010
IPM → POV	-0,7450	0,0080	-0,7370
FDPAD → EG	0,0770	-	0,0770
FDPAD → POV	0,0350	-0,0038	0,0312
EG → POV	-0,1070	-	0,1070

Indeks pembangunan manusia (IPM) berpengaruh negatif dan nyata terhadap kemiskinan. Peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas mampu menurunkan kemiskinan di kabupaten dan kota di kawasan Indonesia Timur. Peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dapat dilakukan dengan peningkatan pada dimensi kesehatan dan pendidikan, yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat. Peningkatan pada dimensi kesehatan dapat dilakukan dengan peningkatan sarana dan prasarana kesehatan baik

secara kualitas dan kuantitasnya, begitu juga untuk pendidikan. Dengan kondisi di kawasan Indonesia Timur yang memiliki geografis yang luas dengan kepadatan yang masih rendah, pembangunan infrastruktur kesehatan dan pendidikan dirasa perlu untuk meningkatkan kualitas pembangunan manusia.

Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga menunjukkan pengaruh negatif dan nyata terhadap kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat diharapkan dapat dinikmati secara merata setiap golongan masyarakat, termasuk penduduk miskin. Laju pertumbuhan ekonomi tercermin dari peningkatan produk domestik regional bruto (PDRB) tanpa mempertimbangkan kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil. Artinya, kenaikan dari kapasitas produksi untuk penambahan output mengalami peningkatan yang signifikan atau cukup signifikan. Perlu disadari bersama bahwa pembangunan ekonomi tidak cukup ditinjau dari pertumbuhan PDRB secara keseluruhan, akan tetapi yang tidak kalah penting juga adalah perlu memperhatikan penyebaran distribusi pendapatan sampai kelapisan masyarakat terbawah (masyarakat miskin) serta hasil-hasilnya sudah dinikmati oleh siapa saja. Selain itu, PDRB yang menurun akan berdampak pada kualitas konsumsi rumah tangga. Dampak tersebut akan menyebabkan tingkat pendapatan penduduk sangat terbatas, rumah tangga miskin cenderung akan mengubah pola konsumsi ke kualitas dan kuantitas rendah dibandingkan sebelumnya. Oleh karena itu, untuk mengukur keberhasilan pembangunan dan merupakan syarat keharusan (*necessary condition*) bagi pengurangan tingkat kemiskinan perlu syarat kecukupan. Adapun syarat kecukupannya adalah pertumbuhan ekonomi tersebut yang lebih efektif dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Artinya, pertumbuhan ekonomi tersebut sekiranya tersebar sampai golongan pendapatan terendah (termasuk di golongan penduduk miskin).

Desentralisasi fiskal yang diukur dengan rasio penerimaan asli daerah terhadap total penerimaan diharapkan mampu menunjukkan eksistensinya dalam membiayai kebutuhan dan preferensi lokal daerah. Peningkatan penerimaan asli daerah merepresentasikan tingkat kemandirian daerah. Penerimaan asli daerah yang meningkat menggambarkan penurunan ketergantungan terhadap pemerintah pusat.

Adanya kebijakan desentralisasi, daerah-daerah akan lebih mandiri dalam pengaturan daerahnya. Daerah yang lebih berotonom dengan adanya desentralisasi fiskal dapat membawa efisiensi ekonomi yang besar dalam pengalokasian sumber daya antar sektor publik. Desentralisasi fiskal mampu memperbaiki efisiensi ekonomi semenjak pemerintah daerah lebih dekat dengan masyarakat lokal daripada pemerintah pusat sehingga pemerintah daerah diharapkan akan lebih tanggap terhadap kebutuhan dan preferensi lokal. Pemerintah dan masyarakat diharapkan dapat membedakan sumber daya lokal untuk menciptakan pembangunan ekonomi yang tinggi di daerah masing-masing ketika keduanya mencapai tingkat otonom. Namun demikian, pada daerah di kawasan Indonesia Timur hal di atas belum tercerminkan. Kondisi yang terjadi di kabupaten dan kota kawasan timur Indonesia adalah desentralisasi fiskal tidak memiliki pengaruh terhadap keberhasilan pembangunan, yang dalam penelitian ini digunakan dengan indikator tingkat kemiskinan. Rata-rata penerimaan asli daerah diluar pulau jawa, khususnya kawasan Timur Indonesia masih relatif kecil jika dibandingkan kawasan barat Indonesia atau daerah-daerah dipulau Jawa. Dorongan pemerintah melalui kebijakan atau program perlu dan tetap dilakukan untuk meningkatkan penerimaan asli daerah, sehingga kedepannya dalam jangka panjang daerah-daerah akan lebih mandiri.

4. PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan pembangunan manusia dan desentralisasi fiskal tidak memiliki pengaruh yang nyata terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain itu, pembangunan manusia secara langsung berpengaruh negatif dan nyata terhadap kemiskinan, namun tidak berpengaruh nyata melalui pertumbuhan ekonomi. Melalui pertumbuhan ekonomi, desentralisasi fiskal tidak berpengaruh nyata terhadap kemiskinan. Temuan lainnya adalah pertumbuhan ekonomi secara langsung berpengaruh negatif dan nyata terhadap kemiskinan.

Peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan peningkatan kapasitas produksi untuk mencapai penambahan output mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan Indonesia Timur. Potensi tenaga kerja yang terserap akan tinggi, sehingga mereka mendapatkan penghasilan guna memenuhi kebutuhan dasar. Kebijakan pemerintah diharapkan mengarah akan hal-hal tersebut dengan meningkatkan investas, pelatihan kerja dan penciptaan lapangan pekerjaan yang memiliki efek pengganda.

5. DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Arsyad, L. (2010). *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: STIM YKPN.
Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Badan Pusat Statistik. (2017a). *Indeks Pembangunan Manusia 2017*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
Badan Pusat Statistik. (2017b). *Penghitungan Dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia*. Jakarta.

Jurnal :

- Achia, T. N. O., Wangombe, A., & Khadioli, N. (2010). A Logistic Regression Model to Identify Key Determinants of Poverty Using Demographic and Health Survey Data. *European Journal of Social Sciences*, 13(1), 38–46.
Adeyemi, S. L., Ijaiya, G. T., & Raheem, U. A. (2009). Determinants of Poverty in Sub-Saharan Africa. *An International Multi-Disciplinary Journal*, 3(2), 162–177.
Agyemang-Duah, W., Kafui Gbedoho, E., Peprah, P., Arthur, F., Kweku Sobeng, A., Okyere, J., & Mengba Dokbila, J. (2018). Reducing poverty through fiscal decentralization in Ghana and beyond: A review. *Cogent Economics and Finance*, 6(1), 1–14. <https://doi.org/10.1080/23322039.2018.1476035>
Akerlele, D., Momoh, S., Samuel A Adewuyi, Biola B. Phillip, & Olumuyiwa F Ashaolu. (2012). Socioeconomic determinants of poverty among urban households in South-West Nigeria. *International Journal of Social Economics*, 39(3), 168–181. <https://doi.org/10.1108/03068291211199341>
Astrini, N. M. M., & Purbadharmaja, I. B. P. (2013). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Pendidikan, Pengangguran terhadap Kemiskinan di Provinsi Bali. *E-Jurnal EP Unud*, 2(8), 384–392.
Caraka, R. E. (2017). Analisis Kemiskinan Di Provinsi Jawa Tengah Dengan Pendekatan Spatial Autoregressive Model. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 11(1), 53–60.
Crook, R. C. (2003). Decentralisation and Poverty Reduction in Africa: The

- Political of Local-Central Relations. *Public Administration and Development*, 23(1), 77–88.
- Dartanto, T., & Nurkholis. (2013). Bulletin of Indonesian Economic Studies The determinants of poverty dynamics in Indonesia : evidence from panel data. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 49(1), 61–84. <https://doi.org/10.1080/00074918.2013.772939>
- Fadli, F. (2014). Analysis of Direct and Indirect Effect of Fiscal Decentralization and Regional Disparity (Case Study Provinces in East and West Indonesia Year 2006-2012). *Journal of Economics and Sustainable Development*, 5(18), 45–56.
- Islam, D., Sayeed, J., & Hossain, N. (2017). On Determinants of Poverty and Inequality in Bangladesh. *Journal of Poverty*, 21(4), 352–371. <https://doi.org/10.1080/10875549.2016.1204646>
- Kedir, A. M., & Mckay, A. (2005). Chronic Poverty in Urban Ethiopia : Panel Data Evidence. *International Planning Studies*, 10(1), 49–67.
- Permadi, Y. A. (2018). Growth, Inequality, and Poverty: An Analysis of Pro-Poor Growth in Indonesia. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 11(2), 216–233.
- Prapdopo, A. A. (2018). Determinants Of Poverty In East Kalimantan Province , Indonesia. *International Journal If Scientific and Technology Research*, 7(5), 5–8.
- Pratama, Y. C. (2014). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 4(2), 210–223.
- Samputra, P. L., & Munanda, A. I. (2019). Korupsi, Indikator Makro Ekonomi dan IPM terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 12(1), 35–46.
- Sisca HS, V., HAMzah, A., & Syechalad, M. N. (2013). Pengaruh Kesempatan Kerja, Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 1(4), 21–30.
- Sofilda, E., Zilal, H., & Sholeh, A. S. (2013). Human Development and Poverty in Papua Province (An Analysis of Simultaneous Approach on Panel Data Regression). *International Journal of Sustainable Development*, 6(6), 51–62.
- Suliswanto, M. S. W. (2010). Pengaruh Produk Domestik Bruto dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Angka Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 8(2), 358–366.
- Usman, U., & Diramita. (2018). Pengaruh Jumlah Penduduk, Pengangguran dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau. *Jurnal Ekonomi Regional Unimal*, 01(02), 9–15.
- Widianingrum, I. F., Riyanto, G., & Mulyanto. (2019). The Role of Physical Capital on Reduction Poverty Evidance Regional Autonomy. *International Journal of Economics and Research*, 10(1), 69–85.